

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan berhasil namun masih terdapat kekurangan yaitu ditemukannya indikator sumber daya kebijakan khususnya sumber daya manusia dan karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan KPP yang masih belum berjalan maksimal. Hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada indikator tujuan dan standar kebijakan sudah terimplementasi dengan baik. Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro sudah selaras dengan implementasi kebijakan di lapangan dan berpedoman pada peraturan bupati. Standar kebijakan juga sudah jelas, ini dibuktikan dengan adanya pedoman dalam pelaksanaan kebijakan KPP di Kabupaten Bojonegoro yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2019. Dengan demikian, tujuan kebijakan KPP sudah tercapai dan prosedur pelaksanaan KPP berjalan dengan tertib.
2. Pada indikator sumber daya kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan KPP pada segi kuantitas masih terdapat permasalahan yaitu jumlah staff pelaksana yang kurang memadai serta seringnya terjadi pergantian tim pelaksana KPP sehingga implementasinya menjadi kurang

efektif dan efisien. Akan tetapi, pada segi kualitas, staff pelaksana kebijakan KPP sudah cukup baik. Selanjutnya, sumber daya finansial dan sarana prasarana di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro untuk implementasi kebijakan KPP sudah cukup dan memadai.

3. Pada indikator hubungan antar organisasi dalam kebijakan KPP di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik, *stakeholder* yang terlibat juga saling bekerja sama sehingga tidak ada permasalahan yang berarti dalam implementasi kebijakan ini.
4. Pada indikator karakteristik pelaksana, tim pelaksana sendiri berasal dari pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dan pembagian kerja sudah baik. Akan tetapi, tim pelaksana tidak memiliki struktur organisasi resmi dalam implementasi KPP di Kabupaten Bojonegoro.
5. Pada indikator lingkungan politik, sosial, dan ekonomi kondisi lingkungan yang paling mendominasi dan berpengaruh adalah lingkungan ekonomi. Masyarakat juga memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijakan ini dan kebijakan ini berdampak bagi pedagang salah satunya meningkatkan jumlah pelanggan.
6. Pada indikator sikap para pelaksana, pelaksana kebijakan KPP di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan KPP ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, keenam indikator dalam implementasi kebijakan KPP di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada perbaikan pada indikator sumber daya kebijakan khususnya sumber daya manusia dan indikator karakteristik pelaksana:

1. Pada indikator sumber daya kebijakan, khususnya sumber daya manusia, perlu adanya penambahan jumlah staff pelaksana kebijakan KPP. Jumlah staff pelaksana di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah tiga orang membuat staff bekerja lebih ekstra dan merangkap tugas lain. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan KPP di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan lebih efisien lagi maka perlu adanya penambahan jumlah staff pelaksana kebijakan KPP.
2. Pada indikator sumber daya kebijakan khususnya sumber daya finansial sudah baik, tapi akan lebih baik jika pemerintah dapat menambah dana realisasi KPP dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro karena sektor perdagangan ini sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.
3. Pada indikator karakteristik pelaksana perlu adanya struktur organisasi resmi untuk pelaksanaan kebijakan KPP di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro agar pembagian tugas staff pelaksana KPP bisa lebih jelas dan terarah.